

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Muharisa Syafelina

2021/21043012

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah

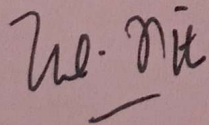
Nama : Muharisa Syafelina
NIM / TM : 21043012 / 2021
Departemen : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, September 2025

Disetujui Oleh:

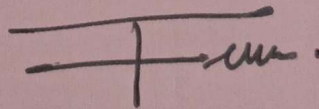
Mengetahui,

Kepala Departemen Akuntansi



Dr. Nelvirita, SE. M.Si, Ak
NIP. 197407061999032002

Dosen Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE. M.Sc. Ak
NIP. 197302131999031003

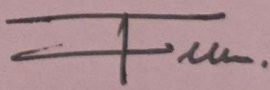
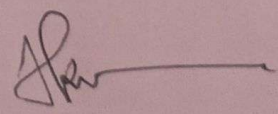
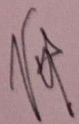
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Kinerja Keuangan Daerah
Nama : Muharisa Syafelina
NIM / TM : 21043012 / 2021
Departemen : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, September 2025

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE. M.Sc. Ak	1. 
2.	Anggota	Dr. Rino Dwi Putra, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muharisa Syafelina
NIM/TM : 21043012/2021
Tempat/Tanggal Lahir : Bukik Batabuah, 03 Maret 2003
Program Studi : S1 Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Limo Suku, Sungai Pua Kab. Agam
Nomor Handphone : 085263919560
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/ skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, September 2025
Saya yang menyatakan



Muharisa Syafelina

21043012/2021

ABSTRAK

Syafelina, M. (21043012/2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pembimbing: Fefri Indra Arza, SE. M.Sc. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dipilih menggunakan teknik total sampling dengan total 190 pemerintah daerah di Sumatera Barat selama periode 2014–2023. Data dianalisis menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan EViews 12. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar baik kinerja keuangan pemerintah daerah, dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula penghasilan daerah yang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Sementara itu, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar transfer dana yang diterima dari pusat maka semakin besar ketergantungan daerah yang mengakibatkan kinerja keuangan menurun.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Syafrizal dan Ibu Surfiana, atas cinta, doa, dan kesabaran yang selalu menemani setiap langkah hidup saya. Dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang tak pernah putus dari Bapak dan Ibu menjadi sumber kekuatan terbesar bagi saya untuk belajar, berjuang, dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ibu Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan pendidikan.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE. M.Sc. Ak selaku dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Sany Dwita, S.E., M.Si., Ph.D., Ak. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan ini.
6. Bapak Dr. Rino Dwi Putra, S.E., M.Si. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan telaah berupa saran, masukan, dan arahan untuk skripsi yang lebih baik.
7. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan untuk skripsi yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dan masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Adik-adikku tersayang Muharizzaki, Muharizziko, Muharifa Syafira, Muhariz Zhio, Muhariz Ziand, dan Muharani Fathihah yang selalu memberikan dukungan penuh, motivasi, dan solusi dari keluh kesah yang penulis alami dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan, Hanifah Zahra, Finna Khairatun Hisanun Muhardi, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan,

semangat, dan bantuan kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi penulis. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, September 2025

Muharisa Syafelina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS ...	11
A. Kajian Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Pengembangan Hipotesis	24
D. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Populasi dan Sampel	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Definisi dan Pengukuran Variabel	34
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B.	Analisis Statistik Deskriptif	44
C.	Uji Pemilihan Model.....	47
D.	Hasil Uji Asumsi Klasik	49
E.	Uji Model.....	51
F.	Uji Hipotesis	53
G.	Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Keterbatasan.....	62
C.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	43
Tabel 2 Statistik Deskriptif	45
Tabel 3 Uji Chow	48
Tabel 4 Uji Hausman	48
Tabel 5 Uji Multikolinearitas	50
Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 7 Uji F	53
Tabel 8 Regresi Data Panel	54
Tabel 9 Uji T	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, otonomi daerah hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Adanya penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Selain itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut Amanda & Yuliana (2023), otonomi daerah adalah suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan daerahnya (Rosemary et al., 2016).

Kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Ilmi, 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur

dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah membutuhkan ukuran penilaian yang kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah beragam dan menggunakan berbagai metode pengukuran (Pasaribu, 2020). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan di daerah tersebut.

Salah satu perwujudan otonomi daerah dalam mengelola keuangan terdapat pada Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan-pembangunan yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Berdasarkan website Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, diketahui pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 2,57%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 5,14%. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang secara signifikan menekan laju pertumbuhan ekonomi serta berdampak pada penurunan pendapatan daerah pada periode tersebut.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Apabila pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui *Gross Domestic Product* (GDP) dapat juga dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional yang menyangkut efektifitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri. Laju pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan produktifitas nasional dengan dana investasi dalam maksimalisasi total produksi yang dapat mendorong tingkat laju pertumbuhan nasional (Febrianty & Putra, 2023).

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah* menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dapat dipastikan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan suatu daerah, yang secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi dan

kewenangan, pemerintah dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah adalah sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi pembangunan dan perkembangan daerah tersebut.

Sementara itu, salah satu komponen yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan APBD baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten adalah dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan menunjukkan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya (Heryanti, 2019). Dana bagi hasil adalah dana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan menunjukkan potensi daerah penghasil.

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN. Dalam rangka untuk mendanai kebutuhan daerah otonomnya, maka pelaksanaan desentralisasi menjadi prioritas dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jenis dana ini merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan tiap tahun dari APBN yang mana dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antara daerah sehingga dapat dialokasikan untuk mendanai keperluan daerah otonom dalam rangka penerapan desentralisasi.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus, termasuk urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Tujuannya untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh daerah, dan untuk meningkatkan perekonomian nasional seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dapat memanfaatkan DAK.

Dengan adanya otonomi daerah harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi kekuasaan dapat dicapai. Pada kenyataannya, masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Halaskova (2016), pemerintah pusat terlalu dominan terhadap pemerintah daerah sehingga pola pendekatan sentralistik dan seragam yang dikembangkan oleh pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Dana perimbangan yang diperoleh daerah dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas, sarana, dan prasarana umum (publik). Jika pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana ini, maka kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan juga dapat meningkat.

Penelitian ini mengacu pada salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudin & Hastuti (2020). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambah variabel independen pertumbuhan ekonomi. Selain itu, cakupan wilayah dalam penelitian ini yaitu pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Barat dan periode penelitian ini yaitu tahun anggaran 2014-2023.

Penelitian Wahyudin & Hastuti (2020) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan,

sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Heryanti (2019) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan, dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Machmud & Radjak (2018) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena hasilnya diharapkan mampu mengidentifikasi faktor penyebab utama yang menentukan kinerja keuangan di tingkat daerah. Sementara itu, kajian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan temuan dalam studi-studi sebelumnya yang menunjukkan hasil variatif terkait pengaruh beberapa variabel terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga diperlukan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif.

Hubungan keagenan dalam konteks tata kelola pemerintahan mencerminkan peran strategis publik (masyarakat) sebagai pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal) dan pemerintah daerah sebagai pihak pelaksana (agen) dalam mengelola urusan pemerintahan secara efektif. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah guna mengelola serta mengatur kebutuhan daerah secara transparan dan akuntabilitas dalam semua keputusan yang diterakkan. Sebagai pihak yang menerima wewenang, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan secara optimal, termasuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan berbagai sumber daya yang berpotensi menjadi penerimaan daerah guna memperkuat tingkat kemandirian fiskalnya. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dengan adanya wawasan mengenai berbagai hal yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerahnya.

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan studi-studi sebelumnya. Salah satu perbedaannya terletak pada objek kajian yang difokuskan pada wilayah administratif kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, yang mencakup total 19 daerah, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Selain itu, perbedaan lain terlihat pada jenis data yang digunakan, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta data pendukung lainnya selama periode 2014 hingga 2023. Rentang waktu ini dipilih untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi fiskal pemerintah daerah

dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi variabel pembeda yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka peneliti memutuskan untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan, khususnya terkait pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, serta kinerja keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai acuan atau pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya perspektif, memperluas informasi, serta memperdalam pemahaman terkait pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan kinerja keuangan daerah di Sumatera Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis menggunakan Eviews 12 sudah didapatkan hasil analisis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2014-2023, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin tinggi juga kinerja keuangan daerah tersebut.
2. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2014-2023, artinya semakin besar dana perimbangan yang diterima daerah maka semakin rendah kinerja keuangan daerah tersebut.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2014-2023, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang diperoleh maka semakin tinggi juga kinerja keuangan daerah tersebut.

B. Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya:

1. Terbatasnya variabel independen yang dianalisis, dalam penelitian ini menguji pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah seperti belanja modal, kapasitas kelembagaan, maupun kebijakan fiskal daerah yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.
2. Cakupan wilayah penelitian ini hanya mencakup 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh mungkin belum dapat digeneralisasi secara keseluruhan atau periode yang berbeda, karena adanya perbedaan karakteristik fiskal dan struktur ekonomi tiap daerah dapat bervariasi.

C. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari terdapatnya keterbatasan selama melakukan penelitian dikarenakan peneliti juga memiliki keterbatasan dari hal pengetahuan dan pengalaman baik secara teoritis maupun praktis. Dari keterbatasan yang ada peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat memaksimalkan kualitas hasil penelitian dengan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel independen yang relevan, seperti belanja modal, indeks kapasitas kelembagaan, efisiensi belanja daerah, atau kebijakan fiskal lainnya.

2. Diharapkan setiap daerah menggali dan memahami sumber daya yang bisa di maksimalkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah lebih fokus pada sektor yang mempunyai potensi untuk berkembang, seperti sektor perdagangan dan sektor pariwisata.
3. Perluasan cakupan wilayah dan waktu penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasi dengan lebih baik. Penelitian selanjutnya dapat mencakup beberapa provinsi di Indonesia atau wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R. dkk. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salempa Empat.
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 1–6.
- Awwaliyah, N. F., & Agriyanto, R. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25–46.
- Fatmawati, A. P., & Pratiwi, O. C. D. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI. *Jurnal Akuntansi*, 62–69.
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Kendali Akuntansi (JKA)*, 1(2), 30–46.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7 (2), 315–320.

Halaskova, M. (2016). Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Public Services. *Journal of Local Self-Government*, 14(3), 379–397. [https://doi.org/10.4335/14.3.379-397\(2016\)ISSN](https://doi.org/10.4335/14.3.379-397(2016)ISSN)

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.)*.

Heryanti, C. D. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8).

Ilmi, M. B. (2023). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH , SIZE DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMDA. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 216–223.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *In Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information SYstem, Applied Management, Accunting and Research*, 5(2), 390–399.
- Natalia, N., & Suprpto, W. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA. *JRAK*, 9(2), 303–318.
- Niswani, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 64–78.
- Noeng, A. Y., Kolit, Y. A. Du. D., & Rato, E. Y. Da. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Provinsi NTT Periode 2016-2020). *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(2), 184–190.

Pasaribu, S. H. (2020). THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE AND BALANCE FUNDS TO THE FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY GOVERNMENT IN THE PROVINCE OF WEST PAPUA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 191–201.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah. (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. (n.d.).

Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 192–209.
<https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>

Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN

BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.

Putri, R. A. R. (2020). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.

Putri, S. P. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 2068–2082.

Putri, & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147.

Rosemary, O., Justine, C., & Barry, B. (2016). LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL AUTONOMY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF NIGERIA AND BRAZIL. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(10), 38–54.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. (n.d.).*

Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.